



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 1 Tahun 2025 Page 4100-4111

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Implementasi Penerapan *E-Government* melalui Sistem Pembayaran *Quick Response Indonesian Standard (QRIS)* Pada Sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Pematangsiantar

Monica Elisabeth Silalahi^{1✉}, Wiros Oktavius Ginting²

Universitas Sumatera Utara

Email: elisabethmonica58@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Pada era digitalisasi, pemerintah Indonesia terus mendorong penerapan teknologi untuk mempermudah berbagai layanan publik, termasuk di sektor keuangan. Salah satu inovasi tersebut adalah penerapan sistem pembayaran Quick Response Indonesian Standard (QRIS) sebagai bagian dari e-government. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi penerapan e-government melalui sistem pembayaran QRIS pada sektor UMKM di Kecamatan Siantar Marihat, Kota Pematangsiantar. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pelaku UMKM, staf Dinas Koperasi, serta pihak terkait lainnya. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan observasi langsung terhadap implementasi QRIS di lapangan serta dokumentasi yang relevan. Pendekatan ini digunakan untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif terkait hambatan, peluang, serta langkah-langkah yang telah diambil oleh pemerintah dalam memaksimalkan pemanfaatan QRIS. Data dan informasi yang dikumpulkan kemudian dianalisis berdasarkan lima indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan dan tercapainya implementasi yaitu indikator implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn yang dikemukakan melalui sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi, kondisi sosial, ekonomi dan politik, karakteristik organisasi pelaksana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan QRIS di sektor UMKM Pematangsiantar telah membawa dampak positif dalam meningkatkan efisiensi transaksi dan mempercepat proses pembayaran. Namun, penerapan ini belum sepenuhnya optimal karena adanya keterbatasan dalam hal pengetahuan dan keterampilan teknologi di kalangan pelaku UMKM, juga masih dibutuhkan peningkatan sosialisasi dan pelatihan dari pemerintah agar implementasi QRIS

dapat berjalan lebih efektif dan merata. Penelitian ini merekomendasikan adanya kebijakan yang lebih proaktif dalam memperluas akses terhadap teknologi serta peningkatan kesadaran dan edukasi di sektor UMKM.

Kata Kunci: *Penerapan E-Government, Sistem Pembayaran, QRIS, UMKM*

Abstract

In the era of digitalization, the Indonesian government continues to encourage the application of technology to facilitate various public services, including in the financial sector. One of these innovations is the implementation of the Quick Response Indonesian Standard (QRIS) payment system as part of e-government. This study aims to describe and analyze the implementation of e-government through the QRIS payment system in the MSME sector in Siantar Marihat District, Pematangsiantar City. This research uses descriptive research methods with a qualitative approach, data collection techniques namely interviews, observation and documentation. Data were collected through in-depth interviews with UMKM actors, Cooperatives Office staff, and other related parties. In addition, this study also utilizes direct observation of the implementation of QRIS in the field and relevant documentation. This approach is used to obtain a comprehensive picture of the obstacles, opportunities, and steps that have been taken by the government in maximizing the use of QRIS. The data and information collected were then analyzed based on five indicators used to measure the success and achievement of implementation, namely the Van Meter and Van Horn policy implementation indicators which are stated through policy targets, resources, communication, social, economic and political conditions, characteristics of implementing organizations. The results of the study show that the implementation of QRIS in the UMKM sector in Pematangsiantar has had a positive impact in increasing transaction efficiency and accelerating the payment process. However, this implementation has not been fully optimized due to limitations in terms of knowledge and technological skills among UMKM actors. In addition, increased socialization and training from the government is still needed so that the implementation of QRIS can run more effectively and evenly. Therefore, this study recommends a more proactive policy in expanding access to technology and increasing awareness and education in the UMKM sector.

Keywords: *Implementation of E-Government, Payment System, QRIS, Micro, Small and Medium Enterprises (UMKM)*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah memindahkan gaya hidup sebagian besar masyarakat Indonesia dari pedesaan ke perkotaan. Masyarakat semakin sering menggunakan *smartphone* dalam kehidupan sehari-hari seperti yang ditunjukkan oleh generasi sekarang yang lebih sering menggunakan *smartphone* dalam kehidupan sehari-

hari. Hal ini terlihat hampir setiap kali konsumen terhubung dan mengobrol di ponselnya, baik melalui saluran seluler maupun media sosial. Hampir seluruh aktivitas sehari-hari erat kaitannya dengan *smartphone*, karena semua orang terhubung dengan internet. Orang-orang menggunakan ponsel pintar untuk berbagai fungsi, seperti menelepon dan mengirim pesan (layanan pesan singkat), mengirim pesan di media sosial, berbisnis, dan mentransfer uang secara *online* (Pasaribu, 2020).

Pada era digitalisasi saat ini, masyarakat tidak dapat menghindari kemudahan dalam melakukan transaksi keuangan. Manusia dipaksa oleh era global untuk terus mengembangkan teknologi yang menyederhanakan dan, dalam beberapa kasus, sepenuhnya menggantikan pekerjaan manusia, termasuk transaksi keuangan. Azhari (2021) mengatakan bahwa perkembangan teknologi dalam sistem pembayaran yang begitu cepat membuat alat pembayaran digital juga berkembang dengan pesat. Baik secara lokal maupun global, penggunaan teknologi modern sebagai alat pembayaran nontunai meningkat pesat, disertai dengan beberapa penyempurnaan yang menjadikan penggunaannya lebih efisien, aman, cepat dan mudah.

Beberapa UMKM menghadapi kendala dalam infrastruktur teknologi yang diperlukan untuk mengimplementasikan solusi pembayaran digital. Masalah seperti konektivitas internet yang tidak stabil dan perangkat keras yang kurang memadai menjadi hambatan. Keterbatasan infrastruktur ini menghalangi pelaku UMKM untuk memanfaatkan *QRIS* secara optimal, mengurangi aksesibilitas dan kenyamanan dalam melakukan transaksi digital. Banyak pelaku UMKM yang belum memahami sepenuhnya cara kerja dan manfaat dari penggunaan *QRIS*. Kurangnya edukasi dan sosialisasi mengenai teknologi pembayaran digital menjadi salah satu faktor utama, sehingga Pelaku UMKM menjadi ragu-ragu atau enggan beralih ke pembayaran digital, sehingga penggunaan *QRIS* belum maksimal. Pelaku UMKM seringkali mengalami masalah teknis dalam penggunaan *QRIS*, seperti kesulitan dalam proses instalasi, penggunaan aplikasi, dan *troubleshooting*. Kendala ini dapat mengurangi pengalaman pengguna dan menghambat adopsi *QRIS* secara menyeluruh. UMKM di Kota Pematangsiantar masih menghadapi kendala dalam mengakses solusi pembayaran digital yang efisien dan mudah digunakan. Metode pembayaran konvensional seperti tunai atau transfer bank masih dominan, sementara solusi digital yang lebih inovatif belum sepenuhnya dimanfaatkan. Selain itu, beberapa UMKM mungkin menghadapi kendala dalam infrastruktur teknologi yang diperlukan untuk mengimplementasikan solusi pembayaran digital yang canggih. Faktor seperti konektivitas

internet dan perangkat keras menjadi hambatan bagi sebagian UMKM (Cayeni, W. & Utari, A. S., 2019).

Kota terbesar kedua di provinsi Sumatera Utara adalah Kota Pematangsiantar, peneliti memilih Kecamatan Siantar Marihat sebagai fokus penelitian dengan beberapa alasan mendasar yang mendukung potensi dan relevansi wilayah ini dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta implementasi *E-Government* dan *QRIS*. Alasan penulis memilih Kecamatan Siantar Marihat sebagai fokus penelitian adalah Pertumbuhan UMKM yang tinggi (Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Pematangsiantar, 2024) Kecamatan Siantar Marihat menunjukkan tingkat pertumbuhan UMKM tertinggi dibandingkan kecamatan lain di kota tersebut. Pertumbuhan ini mencerminkan potensi besar dalam pengembangan UMKM di wilayah tersebut. Selain itu, menurut laporan dari (Badan Pusat Statistik Kota Pematangsiantar, 2024) keragaman jenis usaha UMKM di Kecamatan Siantar Marihat lebih tinggi dibandingkan dengan kecamatan lainnya. Keragaman ini menunjukkan bahwa Kecamatan Siantar Marihat memiliki peluang yang lebih besar untuk menerapkan *E-Government* dan *QRIS* di berbagai usaha.

Melalui penerapan sistem pembayaran *QRIS* dengan mode *Merchant Presented Mode* (MPM), aplikasi *e-wallet* seperti Dana, LinkAja, Gopay, dan OVO memberikan kemudahan bagi pengguna dalam bertransaksi dengan toko atau *merchant*. Dengan menggunakan *QRIS*, transaksi pembayaran dapat dilakukan dengan lebih efisien dan murah, serta memberikan kontribusi signifikan terhadap inklusi keuangan di Indonesia. Di samping itu, penerapan teknologi pembayaran ini juga mendorong kemajuan UMKM dengan memberikan akses yang lebih mudah bagi pelaku usaha kecil untuk terlibat dalam ekosistem transaksi non-tunai. Hal ini tidak hanya memperkuat peran UMKM dalam pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mempercepat adaptasi terhadap tren digitalisasi dalam bisnis termasuk di Kota Pematangsiantar (Dwijayant, A., et al., 2022). Selain itu, pembayaran non-tunai melindungi pelaku usaha dari penerimaan uang palsu selama transaksi. Ketertarikan masyarakat menggunakan *QRIS* setelah tahu fungsinya, menimbulkan animo yang tinggi dari masyarakat Indonesia salah satunya Kota Pematangsiantar, yang mayoritas terdiri dari generasi milenial untuk dapat bertransaksi dalam pembayaran digital secara mudah, cepat dan aman (Rifani, 2023). Penggunaan *QRIS* di Kota Pematangsiantar tergolong cukup banyak bila dibandingkan kota-kota lainnya di Sumatera Utara atau di bawah Kota Medan, yang cenderung sudah melek digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan memberikan gambaran rinci tentang fenomena yang sebenarnya terjadi di lapangan studi, dalam hal ini analisis pelaku umkm yang berada di Kecamatan Siantar Marihat Kota Pematangsiantar dalam menggunakan sistem pembayaran *qris*. Adapun subjek penelitian ini terdiri dari Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Pematangsiantar yang memiliki tanggung jawab dan wawasan luas mengenai kebijakan, program, dan implementasi *e-government*, khususnya dalam konteks *QRIS* pada sektor UMKM di Pematangsiantar sebagai informan kunci, adapun informan utama ialah Kepala Bidang UKM Kota Pematangsiantar yang memiliki peran penting dalam mengkoordinasikan dan mengawasi berbagai program yang berkaitan dengan pengembangan UMKM di Pematangsiantar, kemudian pelaku umkm sebagai representasi dari kelompok yang langsung merasakan dampak penerapan *QRIS*. Dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu metode wawancara, metode observasi, dan metode dokumentasi kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan teori Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2010) yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian diatas, dapat dilihat bahwa kelima indikator implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Van Meter & Van Horn dalam Subarsono (2005), terlihat bahwa Dinas Koperasi Kota Pematangsiantar telah menerapkan sistem pembayaran *QRIS* dan telah memberikan sosialisasi terhadap pelaku UMKM sehingga pengetahuan pelaku UMKM di kota Pematangsiantar terhadap alat pembayaran digital *QRIS* yaitu sebagian besar pedagang kini memahami *QRIS* sebagai alat pembayaran digital yang dikeluarkan Bank Indonesia, dengan keunggulan dibanding sistem pembayaran digital lain seperti OVO, Gopay, dan Dana. *QRIS* mencatat transaksi secara otomatis, memudahkan pembayaran tanpa perlu uang kembalian atau receh, sehingga mendukung efisiensi operasional pelaku UMKM.

1. Sasaran Kebijakan

Sasaran kebijakan merupakan salah satu elemen penting dalam analisis implementasi kebijakan publik, dan Van Meter serta Van Horn mengidentifikasi sasaran kebijakan sebagai salah satu dari lima variabel kunci dalam kerangka mereka. Sasaran kebijakan

merujuk kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang berada di bawah naungan Dinas Koperasi Pematangsiantar. Pelaku UMKM menjadi pihak yang secara langsung diharapkan mendapatkan manfaat dari kebijakan pemerintah dalam menerapkan sistem pembayaran digital berbasis *QRIS*, yang merupakan bagian dari upaya *e-government* dalam mendukung digitalisasi ekonomi.

Berdasarkan analisis yang dilakukan bahwa pendataan UMKM yang telah mengadopsi *QRIS* adalah langkah awal penting untuk perencanaan kebijakan dan pelatihan. Monitoring dilakukan melalui kunjungan lapangan rutin guna memantau implementasi dan memberikan dukungan teknis, serta mendapatkan umpan balik dari pelaku UMKM. Evaluasi kebijakan dilakukan melalui survei kepuasan dan analisis data transaksi *QRIS* untuk mengukur efektivitas. Pelatihan lanjutan diberikan kepada UMKM yang membutuhkan dukungan tambahan. Kedua pihak juga sepakat bahwa kebijakan akan terus disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi dan temuan di lapangan, memastikan penerapan *QRIS* berjalan efektif.

2. Sumber Daya

Sumber daya merupakan salah satu variabel utama yang diidentifikasi oleh Van Meter dan Van Horn dalam model implementasi kebijakan. Variabel ini mencakup berbagai elemen yang diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

a. Sumber Daya Finansial

Berdasarkan analisis yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa sumber daya finansial merupakan elemen kunci dalam implementasi kebijakan *QRIS*. Meskipun dana awal yang dialokasikan cukup memadai untuk memulai implementasi, keberlanjutan dan perluasan program membutuhkan dukungan finansial tambahan. Ini penting untuk memastikan bahwa seluruh UMKM, termasuk yang berada di wilayah terpencil, dapat menikmati manfaat *QRIS*. Pengadaan infrastruktur teknologi dan pelatihan yang memadai harus didukung oleh anggaran yang memadai agar kebijakan *e-government* ini dapat berjalan efektif dan memberikan dampak yang signifikan bagi pelaku UMKM di Pematangsiantar. Dengan demikian, pengelolaan sumber daya finansial yang baik, termasuk perencanaan untuk kebutuhan anggaran di masa depan, akan sangat menentukan keberhasilan implementasi *QRIS* secara menyeluruh.

b. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan analisis yang dilakukan bahwa Dinas Koperasi Pematangsiantar memiliki tenaga kerja yang cukup kompeten dalam teknologi informasi dan manajemen keuangan. Ini menunjukkan bahwa pemerintah setempat telah mempersiapkan SDM yang mampu menangani penerapan teknologi pembayaran digital seperti *QRIS*. Kedua narasumber menekankan bahwa pelatihan telah dilakukan untuk meningkatkan pemahaman staf terhadap sistem *QRIS*, yang merupakan langkah penting dalam proses adopsi teknologi oleh sektor UMKM.

Secara keseluruhan, terlihat bahwa meskipun ada upaya signifikan dari pemerintah dalam meningkatkan kompetensi staf dan memberikan pelatihan kepada pelaku UMKM, terdapat kendala berupa keterbatasan tenaga kerja yang secara khusus dapat menangani pengembangan dan pemantauan sistem *QRIS* secara berkelanjutan. Solusi yang diusulkan oleh kedua narasumber adalah menambah tenaga ahli di bidang IT dan keuangan, yang diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penerapan *QRIS* di sektor UMKM di Pematangsiantar. Dengan demikian, kunci keberhasilan penerapan *e-government* melalui sistem *QRIS* pada sektor UMKM di Pematangsiantar terletak pada dua faktor utama: ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten dan upaya pelatihan yang intensif bagi pelaku UMKM. Kedua elemen ini harus bekerja secara sinergis untuk memastikan bahwa kebijakan ini dapat diimplementasikan dengan sukses.

c. Sumber Daya Teknologi

Secara keseluruhan sumber daya teknologi merupakan faktor penting yang harus terus diperhatikan dan ditingkatkan dalam implementasi *QRIS* di Pematangsiantar. Infrastruktur teknologi yang memadai, seperti jaringan internet yang stabil dan kapasitas server yang cukup, adalah prasyarat untuk memastikan keberhasilan kebijakan ini. Selain itu, dukungan teknologi berupa perangkat keras yang terjangkau dan mudah diakses oleh UMKM, seperti smartphone dan perangkat pembaca *QRIS*, juga menjadi bagian integral dari strategi *e-government* ini. Kedua wawancara juga memperlihatkan bahwa Dinas Koperasi Pematangsiantar sudah berada di jalur yang tepat dalam hal penyediaan teknologi, namun mereka juga menyadari bahwa keberhasilan jangka panjang bergantung pada kemampuan mereka untuk beradaptasi dan meningkatkan kapasitas teknologi seiring dengan bertambahnya volume transaksi dan jangkauan penggunaan *QRIS* di kalangan UMKM. Hal ini menunjukkan komitmen dinas untuk memastikan bahwa implementasi *QRIS* tidak hanya sukses di tahap awal, tetapi juga berkelanjutan dalam jangka panjang.

d. Sumber Daya Informasi

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti, menunjukkan bahwa salah satu kendala utama dalam penerapan *QRIS* adalah rendahnya literasi digital di kalangan UMKM, sehingga pendekatan yang holistik diperlukan. Pendampingan intensif dan pelatihan langsung yang disebutkan oleh Kepala Bidang UMKM mendukung pentingnya sosialisasi yang digambarkan oleh Kepala Dinas. Hal ini mencerminkan kebutuhan akan informasi yang tidak hanya bersifat komprehensif tetapi juga harus disampaikan melalui berbagai cara yang dapat dijangkau dan dipahami oleh pelaku UMKM. Keduanya menegaskan bahwa dengan strategi komunikasi dan pelatihan yang tepat, adopsi *QRIS* dapat meningkat, membantu UMKM di Pematangsiantar lebih siap menghadapi era digitalisasi dalam transaksi bisnis.



Gambar 2.1 Tampilan Website Dinas Koperasi Kota Pematangsiantar

(Sumber: Dinas Koperasi Kota Pematangsiantar)

e. Sumber Daya Organisasi

Berdasarkan hasil wawancara, tampak bahwa Dinas Koperasi Pematangsiantar telah mengembangkan struktur organisasi yang kuat dan mendukung implementasi kebijakan *QRIS*. Hasil wawancara tersebut menyoroti adanya pembagian tugas yang jelas di antara berbagai tim, seperti tim pengembangan, sosialisasi, dan pemantauan. Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Koperasi sudah memiliki fondasi kelembagaan yang cukup solid untuk mendukung implementasi kebijakan. Namun, baik Kepala Dinas Koperasi Kota Pematangsiantar maupun Kepala Bidang UKM Kota Pematangsiantar mengakui bahwa masih ada ruang untuk perbaikan, terutama dalam hal sinergi dengan instansi lain, seperti perbankan dan pemerintah pusat. Kepala Dinas Koperasi menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor untuk

memastikan implementasi *QRIS* berjalan lebih optimal. Sementara itu, Ibu Suryani menggarisbawahi peran perbankan dalam edukasi dan sosialisasi kepada pelaku UMKM, dan menyadari bahwa komunikasi lintas sektor harus ditingkatkan untuk memaksimalkan potensi dari setiap pihak yang terlibat.

3. Komunikasi

Menurut Van Meter dan Van Horn, variabel komunikasi mencakup bagaimana pesan kebijakan dikomunikasikan dari level perumus kebijakan hingga level implementor dan penerima manfaat. Efektivitas komunikasi tergantung pada tiga elemen utama, yaitu kejelasan, konsistensi, dan kelengkapan informasi yang disampaikan. Kejelasan berperan penting agar kebijakan yang dimaksud dapat dipahami dengan baik oleh para pelaksana dan penerima kebijakan, dalam hal ini pelaku UMKM.

Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa Dinas Koperasi sepakat mengenai tantangan akses internet yang dihadapi pelaku UMKM, dan mendukung pendekatan tatap muka untuk memberikan pelatihan dan sosialisasi. Kerja sama dengan lembaga lokal dianggap penting dalam menjangkau pelaku UMKM yang tidak memiliki akses teknologi memadai. Fokus utama dari kedua wawancara adalah untuk memberdayakan pelaku UMKM agar dapat memahami dan mengimplementasikan sistem *QRIS*, meskipun dengan keterbatasan yang ada. Hal ini menunjukkan keselarasan dalam strategi yang diambil oleh Dinas Koperasi dan Bidang UMKM untuk mengatasi kendala yang dihadapi pelaku UMKM.

4. Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik

Kondisi sosial, ekonomi, dan politik di Pematangsiantar sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi *QRIS* pada sektor UMKM. Dari segi sosial, kesiapan pelaku UMKM untuk menerima dan mengadopsi teknologi seperti *QRIS* memerlukan dukungan dalam bentuk pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan. Dari sisi ekonomi, *QRIS* menawarkan peluang besar untuk meningkatkan efisiensi dan pendapatan UMKM, tetapi kesenjangan ekonomi antar UMKM perlu diatasi dengan kebijakan yang inklusif. Sementara itu, stabilitas politik dan dukungan kebijakan dari pemerintah daerah sangat penting untuk memastikan bahwa program ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat yang maksimal bagi pelaku UMKM di Pematangsiantar.

5. Karakteristik Organisasi Pelaksana

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Dinas Koperasi dan Kepala Bidang UMKM, terlihat bahwa Dinas Koperasi Pematangsiantar telah mengantisipasi tantangan dalam implementasi *QRIS* melalui pembentukan struktur organisasi yang jelas dan koordinasi yang baik antar departemen. Kepala Dinas Koperasi menekankan pentingnya struktur yang solid, sementara Kepala Bidang UMKM menyoroti langkah-langkah konkret seperti pembentukan tim koordinasi khusus dan penggunaan teknologi untuk pemantauan. Ini menunjukkan bahwa faktor keberhasilan implementasi *QRIS* sangat bergantung pada kemampuan Dinas Koperasi dalam mengelola sumber daya dan struktur organisasi. Dengan adanya tim koordinasi khusus yang terdiri dari perwakilan setiap departemen, dinas mampu menciptakan kerjasama yang efektif antar bidang, sehingga tidak ada tumpang tindih peran. Koordinasi rutin yang dilakukan juga membantu memastikan bahwa setiap bidang memahami perannya, dan dapat bekerja selaras dengan bidang lain maupun dengan pihak eksternal seperti perbankan dan penyedia teknologi.

SIMPULAN

Sistem pembayaran *QRIS* memberikan kemudahan transaksi bagi pelaku UMKM di Pematangsiantar, khususnya di Kecamatan Siantar Marihat. Konsumen dapat bertransaksi non-tunai hanya dengan menggunakan ponsel mereka, yang mempermudah dan mempercepat proses pembayaran. Kemudahan ini mendorong masyarakat untuk berbelanja lebih sering, sehingga secara tidak langsung berkontribusi pada peningkatan pendapatan pelaku UMKM.

Kebijakan penerapan *QRIS* di Pematangsiantar menargetkan pelaku UMKM sebagai kelompok utama, mengingat peran mereka sebagai tulang punggung ekonomi lokal yang sering terkendala akses layanan keuangan modern. *QRIS* diharapkan menjadi solusi pembayaran yang cepat, aman, dan efisien, membantu UMKM beradaptasi dengan digitalisasi sektor keuangan agar tetap kompetitif di era digital.

Sumber daya yang disediakan oleh Dinas Koperasi Pematangsiantar, seperti infrastruktur teknologi, pelatihan, dan dukungan teknis, berperan penting dalam keberhasilan adopsi *QRIS* oleh UMKM. Kompetensi sumber daya manusia di Dinas Koperasi juga memastikan kelancaran sosialisasi dan edukasi, memungkinkan UMKM memahami dan memanfaatkan *QRIS* secara optimal dalam bisnis mereka.

Komunikasi antara pemerintah, Dinas Koperasi, dan pelaku UMKM menjadi kunci keberhasilan kebijakan *QRIS*. Dinas Koperasi secara aktif mengkampanyekan penggunaan *QRIS* melalui berbagai saluran, seperti media sosial, seminar, dan

penyebaran informasi di lapangan. Komunikasi yang efektif memastikan pelaku UMKM memahami manfaat dan cara penggunaan *QRIS*, mempercepat adopsi teknologi. Umpan balik dari UMKM juga membantu Dinas Koperasi meningkatkan layanan dan dukungan.

Keberhasilan penerapan *QRIS* di Pematangsiantar didukung oleh kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang positif. Peningkatan literasi digital di kalangan UMKM mempermudah adaptasi terhadap *QRIS*. Secara ekonomi, *QRIS* mempercepat transaksi, mengurangi ketergantungan pada uang tunai, serta meningkatkan transparansi keuangan. Dukungan kuat dari pemerintah pusat dan daerah dalam digitalisasi layanan publik serta stabilitas politik memberikan fondasi kuat bagi implementasi kebijakan ini.

Terakhir, karakteristik organisasi pelaksana, yakni Dinas Koperasi Pematangsiantar, Dinas Koperasi Pematangsiantar menunjukkan kesiapan dan kapabilitas yang baik dalam melaksanakan kebijakan *QRIS*. Dengan struktur organisasi yang mendukung, sumber daya manusia kompeten, serta program pelatihan dan bimbingan teknis, dinas secara aktif mendorong adopsi *QRIS* oleh UMKM. Jaringan yang kuat dengan perbankan dan penyedia layanan keuangan juga memperkuat implementasi kebijakan ini, menunjukkan komitmen dinas dalam mendukung UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

- Azhari, A. (2021). Implementasi Sistem Pembayaran Quick Response Code Indonesian Standart (QRIS) Pada Sektor UMKM Di Kota Pematang siantar. Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
- Cayeni, W., & Utari, A. S. (2019). Penggunaan Teknologi Dalam Pendidikan: Tantangan Guru Pada Era Revolusi Industri 4.0. Prosiding Seminar Nasional Program Pascasarjana Universitas Pgri Palembang.
- Dwijayant, A., Anhalsali, S., Rahayu, E. D., Munawar, Z., Komalasari, R., Pramesti, P., & Juliawati, P. . (2022). Manfaat Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) pada Nasabah di Bank Jabar Banten (BJB). . *ATRABIS: Jurnal Administrasi Bisnis*, 8(2), 256-264.
- Pasaribu, R. A. (2020). Manfaat Smartphone Dalam Menunjang Aktivitas Perkuliahan Mahasiswa Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Rifani, R. A. (2023). Penerapan Sistem Pembayaran QRIS pada Sektor UMKM di Kota Parepare. *Amsir Accounting & Finance Journal*, 1(1), 16-23

Sugiyono. (2016). Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif. Bandung: CV Alfabeta.